



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institut of Indonesia Chartered Accountants



KAPd

PROSIDING

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI

SNA XX

UNIVERSITAS JEMBER 2017

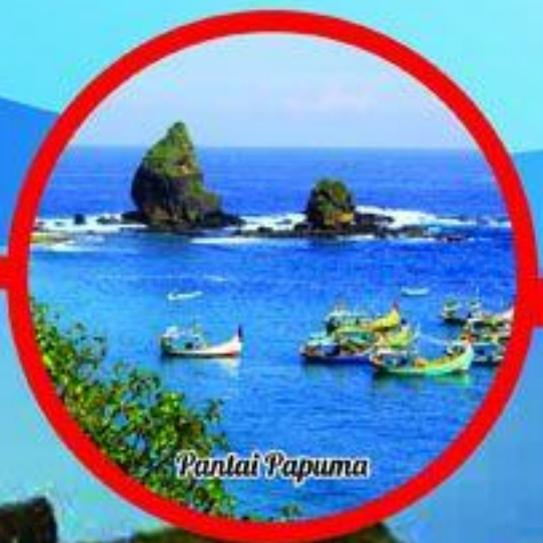
*Harmonisasi Spirit Kebhinekaan (Pendalungan)
 untuk Penguatan Profesionalitas Akuntan
 Menuju Indonesia Jaya*



Jember Fashion Festival



Kebun Kakao



Pantai Papuma



Monumen Unej

27-30
SEPTEMBER
 2017

Pantai Watu Ulo



9 772597 730004



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XX JEMBER
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto, Jember 68121
E-mail : sekretariat-sna20jember@sna-iaikapd.or.id

PROSIDING

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI (SNA) XX JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2017 JEMBER

***“Harmonisasi Spirit Kebhinnekaan
(Pendalungan) untuk Penguatan Profesionalitas
Akuntan Menuju Indonesia Jaya”***

Editor Team:
Ikatan Akuntan Indonesia
Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)

ISSN 9 772597 730004

Diterbitkan:
Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)
2017

No.	Kode.	Judul Paper	Penulis
193	ASPAK-028	KARAKTERISTIK KEPALA DAERAH DAN UKURAN DPRD TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA PENDIDIKAN (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SULAWESI)	YULIA INDAH CINTAMI, BANDI
194	AKMK-072	STRATEGIC PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM, FIRM CAPABILITIES AND BUSINESS STRATEGY	YULIANSYAH YULIANSYAH, ARIEF FADILLAH
195	AKMK-051	NON-FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEMS, PROCEDURAL JUSTICE, TRUST TO MANAGER AND THEIR IMPACT ON EMPLOYEE LOYALTY	YULIANSYAH YULIANSYAH, MARYANI MARYANI
196	PAK-031	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ENTERPRISE RESOURCE PLANNING	YUNI NUSTINI, DIPTA WAHYU PRABAWA
197	AKSR-033	ANALISIS MARKET SHARE PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	YUNUS HARJITO, DIAN BUDI UTAMI, DIAN INDRIANA HAPSARI
198	AKPM-059	PENGARUH BIOLOGICAL ASSET INTENSITY, UKURAN PERUSAHAAN, KONSENTRASI KEPEMILIKAN, DAN JENIS KAP TERHADAP PENGUNGKAPAN ASET BIOLOGIS (PADA PERUSAHAAN AGRIKULTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PE	YURNIWATI, AMSAL DJUNID, FRIDA AMELIA
199	ASPGG-028	POLITISASI ANGGARAN PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH SAAT PENYELENGGARAAN PILKADA DI PULAU JAWA	ZAENAL SEKTY WIJAYA, BANDI
200	AKPM-074	PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN DERAJAT KONVERGENSI IFRS TERHADAP KUALITAS LABA PADA NEGARA-NEGARA ASEAN	ZHRATUN NADHIR , RATNA WARDHANI

F. DAFTAR PAPER DITERIMA SEBAGAI POSTER PRESENTATION SNA XX JEMBER 2017

DAFTAR PAPER DITERIMA SEBAGAI POSTER -PRESENTATION SNA KE-20 JEMBER 2017			
NO	KODE	JUDUL	NAMA
1	SIPE-083	INVESTIGASI GENDER DALAM PEMBAJAKAN PRODUK DIGITAL: CERITA DARI MAHASISWA DI INDONESIA	ADITYA PANDU WICAKSONO, DEKAR URUMSAH
2	CG-044	DAMPAK SURPLUS FREE CASH FLOW TERHADAP MANAJEMEN LABA: PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI	ALIYA GISTA MAKRFAT, AGUS PURWANTO
3	PPJK-035	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	AMRIE FIRMANSYAH
4	CG-061	CEO-BOD POWER INTERACTIONS AND FRAUD: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE INDONESIAN CONTEXT	ANDRI ZAINAL
5	ASPGG-043	TOWARD COMMUNITY-BASED TOURISM IN TOBA CALDERA: A PARTICIPATORY FRAMEWORK	ANDRI ZAINAL, GAFFAR HAFIZ SAGALA

Karakteristik Kepala Daerah dan Ukuran DPRD terhadap Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan

Jenis Sesi : Full Paper

Yulia Indah Cintami

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

yuliainsp47@gmail.com

Bandi

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

bandi.ssm@gmail.com

Abstract: This study aims at analyzing some matters related to regional expenditure budget, especially educational budget in order to obtain the empirical evidence about possible indications of misuse of the allocation of educational budget and to look for factors which likely affect the budget allocation.

The data used in this study is secondary data with samples of 47 districts/ municipalities in Sulawesi during period 2010-2015. This study uses the analysis tools of independent sample t-test to find out whether incumbent regional head's educational budget allocation in the second term is bigger than a non incumbent regional head's and multiple linear regression test to see the factors which affect the amount of educational budget allocation.

The results show that the average of incumbent regional head's educational budget allocation in the second term is not bigger than a non incumbent. It indicates that there is no misuse of educational budget allocation by the incumbent regional head in the second term. The regression test result showed that term of regional head, education level of regional head and the size of Regional House of Representatives (DPRD) have an effect on the amount of educational budget allocation. This study did not get a proof that age of regional head affect the allocation of educational budget.

Keywords: educational budget, the incumbent, the size of DPRD

1. Pendahuluan

Investasi dalam bidang pendidikan menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini dan mengalokasikan persentase yang lebih besar dari anggarannya untuk sektor pendidikan (World Bank 2008). Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) menugaskan Negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan sebuah penegasan di pasal 49: “(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”, “(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”. Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan bahwa ketentuan 20 persen dari total pengeluaran harus mencakup seluruh pengeluaran pendidikan (termasuk pengeluaran gaji) di setiap tingkat pemerintahan.

Indonesia telah mengalami peningkatan belanja pemerintah untuk sektor pendidikan. Pengeluaran agregat tahun 2006 di tingkat daerah telah dapat memenuhi amanat undang-undang “20 persen” dengan belanja gaji diikutsertakan dalam perhitungan, namun porsi belanja APBD pendidikan diluar gaji masih dibawah angka 10 persen (World Bank 2008; Arifin dan Yuliarni 2012; Yuliarni 2012).

Alokasi anggaran belanja pendidikan tidak terlepas dari karakteristik kepala daerah dan jumlah anggota DPRD pada tiap-tiap daerah. Kepala daerah dan anggota DPRD merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal penganggaran dan penyerapan belanja daerah.

Fenomena penyalahgunaan dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh kepala daerah tidak terlepas dari proses pengangkatan kepala daerah itu sendiri. Penyalahgunaan APBD oleh kepala daerah baik *incumbent* maupun non *incumbent* disebabkan karena dalam proses pengangkatannya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Mahalnya pemilu kepala daerah di Indonesia disebabkan pemilu kepala daerah merupakan pesta akbar dan harus dibiayai khusus mulai dari pendaftaran, pengadaan barang dan jasa untuk pencoblosan, dan kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan calon kepala daerah (Prasojo 2009). Pendistribusian anggaran belanja pada pos-pos yang menguntungkan *incumbent* saat pemilu kepala daerah dengan meluncurkan program-program yang berorientasi pada pelayanan publik seperti pada pelayanan kesehatan, infrastruktur dan pelayanan pendidikan dapat dilakukan agar pemilih tertarik untuk memilih *incumbent* (Drazen dan Eslava 2010). Diduga ada potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) ketika kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan maju kembali menjadi calon kepala daerah (Ritonga dan Alam 2010).

Ferraz dan Finan (2007) mengatakan bahwa walikota dalam periode kedua lebih banyak melakukan praktik korupsi dibandingkan dengan walikota pada periode pertama. Hal ini dikarenakan walikota pada periode pertama masih memikirkan jangka waktu politik yang masih dimiliki yaitu apabila masih dipilih kembali, sedangkan pada walikota pada periode kedua akan lebih memikirkan bagaimana karir ke depannya setelah lengser. Kepala daerah *incumbent* pada masa jabatan ke dua cenderung bukan pada pencapaian kinerja, tetapi

cenderung pencapaian kemakmuran pribadi/golongan, hal ini terjadi sebagai imbas dari besarnya biaya politik yang sudah dikeluarkan selama pemilihan kepala daerah (pemilukada) dan untuk mendapatkan dukungan partai politik (Prasetyo 2014).

Fenomena penyalahgunaan dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh kepala daerah menjadi salah satu masalah yang ingin diteliti dengan mengidentifikasi besarnya alokasi anggaran belanja pendidikan antara kepala daerah *incumbent* pada masa jabatan kedua dan non *incumbent*. Masalah lain yang perlu dikaji yaitu faktor apa saja yang berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja pendidikan. Penelitian ini menguji karakteristik kepala daerah dan ukuran DPRD terhadap alokasi anggaran belanja pendidikan.

Penelitian yang menguji karakteristik kepala daerah terhadap belanja daerah khususnya alokasi anggaran belanja pendidikan belum pernah diteliti sebelumnya. Karakteristik kepala daerah pernah diteliti sebelumnya terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Prayitno (2012) dan Prasetyo (2014) meneliti tentang karakteristik kepala daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Prayitno (2012) menunjukkan bahwa masa kerja/jabatan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan untuk level/tingkat pendidikan, umur dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Prasetyo (2014) dimana masa kerja/jabatan dan *incumbent* kepala daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan untuk umur dan tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hit dan Tyler (1991) meneliti tentang karakteristik eksekutif pada 65 eksekutif puncak di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur, lama pengalaman kerja, pengalaman fungsional dan jenis pendidikan eksekutif berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis pihak eksekutif.

Ariffin, McGowan, Tunde dan Shahnaz (2014) meneliti tentang karakteristik tim manajemen puncak pada 83 perusahaan multinasional Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa usia dan latar belakang fungsional memiliki pengaruh positif terhadap tingkat diversifikasi internasional.

Bradbury dan Stephenson (2003) meneliti hubungan antara jumlah komisi kabupaten dengan pengeluaran publik pada 154 kabupaten di Georgia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kabupaten dengan jumlah anggota komisi tunggal tingkat pengeluaran rata-rata per

kapitanya lebih rendah daripada kabupaten dengan jumlah anggota komisi 7,8, atau 9. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian MacDonald (2008) dimana ukuran dewan kota tidak berpengaruh terhadap pengeluaran.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Prasetyo (2014). Perbedaannya adalah penelitian ini menghubungkan karakteristik kepala daerah dengan alokasi belanja pendidikan dan peneliti menambahkan satu variabel baru yaitu ukuran DPRD sebagai variabel independennya.

Penelitian ini sangat penting karena dapat mengetahui sejauhmana kepala daerah *incumbent* pada masa jabatan kedua dan non *incumbent* dalam mengalokasikan anggaran belanja pendidikan dan faktor apa yang mempengaruhinya dalam pengalokasian anggaran belanja pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kepala daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja pendidikan agar lebih efektif.

Berdasarkan masalah di atas, maka pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah alokasi anggaran belanja pendidikan kepala daerah *incumbent* pada masa jabatan kedua lebih besar daripada non *incumbent* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sulawesi periode 2010-2015? 2) Apakah faktor karakteristik kepala daerah yang terdiri dari umur, masa jabatan dan tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh pada besarnya alokasi anggaran belanja pendidikan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sulawesi periode 2010-2015? 3) Apakah faktor ukuran DPRD berpengaruh terhadap penentuan besarnya alokasi anggaran belanja pendidikan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sulawesi periode 2010-2015?

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian akan dijelaskan sebagai berikut ini: 1) Memperoleh bukti empiris mengenai perbedaan alokasi anggaran belanja pendidikan antara kepala daerah *incumbent* pada masa jabatan kedua dan non *incumbent* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sulawesi. 2) Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh faktor karakteristik kepala daerah yang terdiri dari umur, masa jabatan dan tingkat pendidikan kepala daerah serta ukuran DPRD terhadap besarnya alokasi anggaran belanja pendidikan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sulawesi.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Landasan Teori

Teori Prospek

Teori prospek (*prospect theory*) dari Kahneman dan Tversky (1979) menjelaskan terjadinya bias kognitif yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kondisi

ketidakpastian dan berisiko. Individu akan bersifat menghindari risiko atau menyukai risiko tergantung pada masalah yang dihadapi. Teori ini berpendapat bahwa individu akan memberikan bobot yang berlebihan terhadap hasil yang pasti daripada yang belum pasti. Kecenderungan ini menimbulkan perilaku menghindari risiko dalam kondisi pasti untung (*positive framing*). Dalam *positive framing*, individu menunjukkan penurunan preferensi risiko, dimana individu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, individu lebih menyukai risiko dalam kondisi pasti rugi (*negative framing*). *Negative framing* diprosikan dengan penyajian informasi mengenai kerugian yang pasti.

Teori Prospek menggambarkan bagaimana individu mengevaluasi suatu pilihan potensi keuntungan atau kerugian. Seseorang akan memutuskan untuk mendukung dan berperan aktif dengan mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh sebagai keuntungan atau kerugian yang lebih besar. Seseorang akan menghitung nilai berdasarkan hasil potensi dan probabilitas masing-masing dan kemudian memilih yang memberikan nilai yang lebih besar.

Karakteristik Kepala Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Poerwadarminta (2006: 445) mendefinisikan karakteristik sebagai ciri-ciri khusus, mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian karakteristik kepala daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat dan dimiliki kepala daerah yang membedakan antara satu dengan yang lainnya dalam memimpin pemerintah daerah. Karakteristik kepala daerah dapat berupa umur, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan, latar belakang fungsional dan lama menjabat sebagai kepala daerah sebagaimana pandangan *upper echelons theory* (Hambrick dan Mason 1984).

Teori *upper echelons* menganggap konsep manajemen puncak sebagai pembuat keputusan strategis dalam organisasi, sehingga mempunyai dampak secara langsung pada *outcomes* organisasi. Dasar pikiran utama dari teori *upper echelons* adalah pengalaman para eksekutif, nilai-nilai dan *personality* yang berpengaruh besar terhadap interpretasi atas situasi yang dihadapi dan mempengaruhi pilihan manajer puncak. Hambrick dan Mason (1984) juga mengusulkan karakteristik direktur utama seperti usia, pengalaman fungsional dan tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai indikator kemampuan berfikir dan dasar penilaian dari direktur utama perusahaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel karakteristik kepala daerah yang terdiri dari umur, masa jabatan dan tingkat pendidikan kepala daerah.

1. Umur Kepala Daerah

Umur seorang manajer dapat menggambarkan kedewasaan dan kematangan seseorang, sehingga dengan umur kepala daerah yang tinggi mengindikasikan kedewasaan dan kematangan dalam berfikir yang berakibat pada pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah dan mampu mencapai kinerja keuangan yang lebih baik. Dalam literatur *upper echelons theory* dinyatakan bahwa usia seorang manajer secara positif berhubungan dengan kecenderungan untuk melihat lebih banyak informasi, mengevaluasi informasi dengan lebih akurat, dan lebih lama dalam mengambil keputusan (Hambrick dan Mason 1984).

2. Masa Jabatan Kepala Daerah

Masa Jabatan didefinisikan sebagai lama waktu seseorang menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Manajer dengan pengalaman kerja yang lebih lama mempunyai hubungan yang positif dengan pengambilan keputusan sehingga berpengaruh terhadap kinerja sebuah organisasi. Manajer yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki beberapa keunggulan diantaranya : (1) mendeteksi kesalahan (2) memahami kesalahan (3) mencari penyebab munculnya kesalahan (Asih 2006). Menurut Ellis dan Child (1973) menyatakan bahwa semakin lama masa jabatan berhubungan dengan konservatisme dan penghindaran terhadap risiko.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan satu dari beberapa butir persyaratan kompetensi dalam memenuhi kualifikasi dasar sebagai kepala daerah. Eksekutif yang memiliki pengetahuan yang tinggi mempunyai keterbukaan pikiran dan kemampuan memproses informasi yang kompleks karena memiliki kognitif yang lebih baik (Hambrick dan Mason 1984). Eksekutif yang memiliki level pendidikan yang lebih tinggi memiliki kognitif yang lebih kompleks (Hitt dan Tyler 1991).

Ukuran DPRD

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 149 menyebutkan DPRD Kabupaten/Kota memiliki tiga fungsi yaitu pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. DPRD melakukan pemantauan kesesuaian jalannya pemerintahan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat memperketat pengawasan keuangan pemerintah daerah. Konsekuensinya, kepala daerah akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penelitian ini menggunakan ukuran DPRD dengan proksi jumlah anggota DPRD sebagai kendali dari motif kepala daerah untuk menganggarkan belanja yang sifatnya menguntungkan pribadinya. Banyaknya anggota DPRD maka akan lebih ketat kontrol yang dilakukan terhadap kebijakan alokasi belanja daerah, termasuk di dalamnya alokasi anggaran belanja pendidikan. Variabel ini digunakan dalam penelitian Giligan dan Matsusaka (2001); Bradbury dan Stephenson (2003) dan MacDonald (2008).

Belanja Pendidikan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Rincian belanja menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dibagi ke dalam dua bentuk yaitu berdasar sifat dan fungsinya. Berdasar sifat ekonominya belanja daerah terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Berdasar fungsinya terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pendidikan, pariwisata, budaya, agama serta perlindungan sosial.

Belanja pendidikan merupakan belanja daerah dari sisi rincian belanja menurut fungsinya yaitu untuk membiayai kegiatan pendidikan. Belanja pendidikan merupakan tindak lanjut dari proses penganggaran yang telah dialokasikan per satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan apa yang telah disusun menjadi APBD. Dalam hal ini, yang ditindaklanjuti adalah realisasi terhadap kegiatan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan realisasi anggaran pendidikan adalah menindak lanjuti rencana keuangan yang tertuang dalam anggaran belanja pendidikan sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang di dalam APBD.

2.2. Pengembangan Hipotesis

Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan Kepala Daerah Incumbent dan Non Incumbent

Kepala daerah yang mencalonkan dalam pemilukada yang didukung partai politik atau gabungan partai politik berpotensi melakukan penyelewengan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Prasetyo (2014) kepala daerah *incumbent* pada masa jabatan kedua cenderung bukan pada pencapaian kinerja, tetapi lebih cenderung pada pencapaian kemakmuran pribadi/golongan, hal ini terjadi sebagai imbas dari besarnya biaya politik yang sudah dikeluarkan selama pemilihan kepala daerah dan untuk mendapatkan dukungan dari partai politik.

Berdasarkan kerangka teori prospek bahwa setiap individu akan bersifat menyukai risiko tergantung pada masalah yang dihadapi, maka kepala daerah selaku pengelola keuangan daerah dan selaku pengemban jabatan politis akan mengambil keputusan yang menguntungkan dalam pengelolaan keuangan APBD bagi dirinya maupun golongannya, yang dalam hal ini partai pendukungnya. Berdasarkan uraian di atas dapat dikembangkan hipotesis: H₁: Alokasi anggaran belanja pendidikan kepala daerah *incumbent* pada masa jabatan kedua lebih besar daripada non *incumbent*.

Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Chauffman, Shulman, Steinberg, Claus, Banich, Graham, dan Woolard (2010) bahwa dengan meningkatnya umur, maka perilaku menghindari dari risiko akan semakin meningkat.

Berdasarkan kerangka teori prospek bahwa setiap individu akan bersifat menghindari risiko tergantung dari masalah yang dihadapi, maka kepala daerah selaku pengelola keuangan daerah akan ikut berperan aktif pada setiap kebijakan daerah manakala kebijakan tersebut menguntungkan dan sebaliknya akan kurang mendukung apabila kebijakan tersebut dirasakan kurang menguntungkan. Sikap ini akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan (Kahneman dan Tversky, 1979). Kepala daerah dengan umur yang tinggi akan bertindak lebih konservatif dan akan membuat pilihan untuk menghindari risiko seperti rasionalisasi anggaran belanja pendidikan yang akan dialokasikan pada tahun selanjutnya sehingga akan berusaha mencapai kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan penyerapan anggaran belanja pendidikan. Berdasarkan uraian di atas dapat dikembangkan hipotesis:

H_{2a}: Umur kepala daerah berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja pendidikan.

Masa Jabatan

Masa Jabatan didefinisikan sebagai lama waktu seseorang menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Manajer dengan pengalaman kerja yang lebih lama mempunyai hubungan yang positif dengan pengambilan keputusan sehingga berpengaruh terhadap kinerja sebuah organisasi. Manajer dengan pengalaman kerja yang lebih lama berpengaruh positif dalam pengambilan keputusan yang etis (Hit dan Tyler 1991).

Berdasarkan kerangka teori prospek bahwa setiap individu akan bersifat menghindari risiko tergantung dari masalah yang dihadapi, maka kepala daerah selaku pengelola keuangan daerah dengan masa jabatan yang lebih lama akan membuat pilihan keputusan untuk

menghindari risiko seperti rasionalisasi anggaran belanja pendidikan yang akan dialokasikan pada tahun selanjutnya sehingga akan berusaha mencapai kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan penyerapan anggaran belanja pendidikan. Berdasarkan uraian di atas dapat dikembangkan hipotesis:

H_{2b}: Masa jabatan kepala daerah berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja pendidikan.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan proses untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga dengan pendidikan dapat memahami aktivitas dan lingkungan sekitar. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka perilaku menghindar dari risiko akan semakin meningkat (Amaefula, Okezie dan Mejeha 2012).

Berdasarkan kerangka teori prospek bahwa setiap individu akan bersifat menghindari risiko tergantung dari masalah yang dihadapi, maka pendidikan seharusnya secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir seorang kepala daerah dalam membuat pilihan untuk menghindari risiko seperti rasionalisasi anggaran belanja pendidikan yang akan dialokasikan pada tahun selanjutnya sehingga akan berusaha mencapai kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan penyerapan anggaran belanja pendidikan. Berdasarkan uraian di atas dapat dikembangkan hipotesis:

H_{2c}: Tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja pendidikan.

Ukuran DPRD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu kewenangan DPRD adalah melakukan pengawasan jalannya pemerintahan agar pelaksana kebijakan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan akan menjadi kontrol terhadap penyimpangan pelaksanaan anggaran sehingga berdampak pada kinerja pemerintahan. Anggota legislatif dengan jumlah yang lebih banyak cenderung meningkatkan belanja pemerintah dalam bidang pendidikan dan infrastruktur (Giligan dan Matsusaka 2001).

Berdasarkan kerangka teori prospek bahwa setiap individu akan bersifat menghindari risiko tergantung dari masalah yang dihadapi, maka semakin banyak jumlah anggota DPRD maka semakin besar kontrol terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kepala daerah sebagai pengelola keuangan daerah dalam membuat pilihan keputusan untuk menghindari risiko seperti rasionalisasi anggaran belanja pendidikan yang akan dialokasikan pada tahun selanjutnya sehingga akan berusaha mencapai kinerja

keuangan yang baik dengan memaksimalkan penyerapan anggaran belanja pendidikan. Berdasarkan uraian di atas dapat dikembangkan hipotesis:

H₃: Ukuran DPRD berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja pendidikan.

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sulawesi periode 2010-2015 yang telah diaudit oleh BPK. Total populasi adalah 80 kabupaten/kota. Jumlah sampel yang diambil dari populasi tersebut sebanyak 47 kabupaten/kota. Jumlah sampel tersebut telah memenuhi jumlah minimum pengambilan sampel, karena dalam metode analisis regresi berganda dibutuhkan jumlah sampel minimum sepuluh kali jumlah variabel independennya (Sekaran 2006).

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yang berarti sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Data alokasi anggaran belanja pendidikan dalam APBD propinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2010-2015 diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data belanja diambil dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data karakteristik kepala daerah dan jumlah anggota DPRD diambil dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) dan website masing-masing pemerintah daerah.

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan dependen dengan definisi dan pengukuran sebagai berikut:

a. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi anggaran belanja pendidikan. Proporsi belanja pemerintah daerah menginformasikan kepada pembaca laporan keuangan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja tertentu (Mahmudi 2010). Alokasi anggaran belanja dihitung dengan membandingkan anggaran belanja tersebut terhadap total anggaran belanja.

Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan dihitung dengan membandingkan jumlah anggaran belanja pendidikan tahun x dengan total anggaran belanja tahun x . Rumus menghitung alokasi anggaran belanja pendidikan dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\text{Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan} = \frac{\text{Anggaran Belanja Pendidikan Tahun } x}{\text{Total Anggaran Belanja Tahun } x}$$

(1)

b. Variabel Independen

1) Karakteristik Kepala Daerah

Karakteristik kepala daerah merupakan variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari umur, masa jabatan dan tingkat pendidikan kepala daerah.

a) Umur Kepala Daerah (X_1)

Umur menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu sebagai lamanya waktu hidup (Poerwadarminta 2006: 1126). Variabel umur kepala daerah dihitung sesuai umur kepala daerah yang menduduki jabatannya. Umur kepala daerah diukur berdasarkan jumlah umur kepala daerah ditetapkan sampai dengan tahun 2015. Instrumen untuk mengukur variabel umur mengacu pada penelitian Rahmawati (2015). Variabel umur dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga. Umur kurang dari 40 tahun dikategorikan sebagai usia muda diberi nilai "1", umur 40 sampai dengan 55 tahun dikategorikan usia menengah diberi nilai "2", dan umur di atas 55 tahun dikategorikan usia tua diberi nilai "3".

b) Masa Jabatan Kepala Daerah (X_2)

Masa jabatan didefinisikan sebagai lama waktu seseorang menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Pada penelitian ini dapat diartikan sebagai lama waktu kepala daerah memimpin daerah kabupaten/kota/provinsi. Kepala daerah di Indonesia dapat menjabat lebih dari satu periode, dimana satu periode kepemimpinan selama lima tahun. Instrumen untuk mengukur masa jabatan kepala daerah disini mengacu pada penelitian yang dilakukan Prayitno (2012) dan Rahmawati (2015). Variabel masa jabatan dalam penelitian ini diukur berdasarkan pada jumlah bulan sejak kepala daerah dilantik sampai dengan periode tahun 2015.

c) Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X_3)

Menurut Hitt dan Taylor (1991) eksekutif yang memiliki level pendidikan yang tinggi memiliki kognitif yang lebih kompleks. Instrumen untuk mengukur tingkat pendidikan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015). Variabel tingkat pendidikan kepala daerah dalam penelitian ini diukur untuk tingkat SMA diberi nilai "1", strata 1 diberi nilai "2", strata 2 diberi nilai "3" dan strata 3 diberi nilai "4".

2) Ukuran DPRD

Peranan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan sesuatu yang sangat penting (Winarna dan Murni 2007). Instrumen untuk mengukur ukuran DPRD dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo dan Winarna

(2013) dan Prasetyo (2014). Ukuran DPRD pada penelitian ini diukur dengan jumlah anggota DPRD.

3.3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Independent Samples T-Test* untuk menguji hipotesis pertama. Pengujian hipotesis 2a, 2b, 2c dan 3 menggunakan analisis regresi linier berganda, didahului dengan uji *descriptive statistic*.

a. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data penelitian seperti rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum.

b. *Independent Samples T-Test*

Analisis ini digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berhubungan. Sampel yang digunakan anggotanya berbeda satu dengan yang lain. H_0 diterima bila *asymptotic sig* lebih besar dari alpha 0,05, jika *asymptotic sig* lebih kecil dari alpha 0,05 maka H_a diterima.

c. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda pada penelitian ini adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan variabel independennya. Untuk pengujian hipotesis dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan delapan, regresi dilakukan dengan cara mengukur *goodness of fit* model regresi, untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Tujuan analisis regresi adalah melakukan pendugaan dan menguji pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen (Sugiyono 2014). Pendugaan tersebut digambarkan dalam persamaan regresi yaitu :

$$ALKBJPDDK = \beta_0 + \beta_1UMUR + \beta_2MJ + \beta_3TKPDDK + \beta_4LEG + e.$$

Keterangan Persamaan Regresi Berganda :

Simbol	Keterangan
ALKBJPDDK	Alokasi anggaran belanja pendidikan pemerintah daerah tahun 2010 – 2015,
UMUR	Umur Kepala Daerah, diukur dengan nilai 1 jika berumur < 40 tahun, nilai 2 jika berumur 40 - 55 tahun dan nilai 3 jika berumur > 55 tahun,
MJ	Masa Jabatan Kepala Daerah diukur dengan jumlah bulan sejak dilantik sampai dengan periode tahun 2015,
TKPDDK	Tingkat pendidikan Kepala Daerah yang diukur dengan nilai 1 jika SMA, nilai 2 jika S1, nilai 3 jika S2 dan nilai 4 jika S3,
LEG	Ukuran DPRD yang diukur dengan jumlah anggota DPRD,

1, ..., 7	Konstan,
E	Koefisien regresi dan <i>Error.</i>

4. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi sebanyak 80 pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sulawesi periode 2010-2015. Dari jumlah populasi tersebut didapatkan sampel total sebanyak 47 pemerintah kabupaten/kota yang diambil berdasarkan metode *purposive sampling* dengan mengurangi jumlah populasi berdasarkan berbagai kriteria dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

Sampel Penelitian

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah total populasi	80
2	Pemerintah daerah yang mempublikasikan laporan keuangan namun datanya secara kontinyu tidak tersedia dan tidak lengkap	(33)
3	Total sampel	47

Sumber : BPK RI, Dirjen Otda Kemendagri, DJPK, Web Site Pemerintah Daerah.

4.1. Statistik Deskriptif

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil penghitungan analisis deskriptif dari masing-masing variabel dalam penelitian yang meliputi: nilai rerata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Hasil statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2

Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Alokasi Angg. Bj. Pddk	282	16.04	48.87	31.1155	6.70778
Umur	282	1.00	3.00	2.4255	.54979
Masa Jabatan	282	1.00	120.00	58.1773	33.33221
Tingkat Pendidikan	282	1.00	4.00	2.5957	.82210
Ukuran DPRD	282	20.00	45.00	29.2411	6.30246

Sumber: Hasil pengolahan data, 2017.

Pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel keseluruhan 282 buah. Variabel dependen Alokasi anggaran belanja pendidikan (Y) memiliki nilai minimum 16,04%

dan nilai maksimum 48,87%, sedangkan nilai *mean* 31,1155% dan standar deviasinya 6,70778. Variabel independen Umur memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 3, sedangkan nilai *mean* 2.4255 dan standar deviasi 0,54979. Hal ini berarti sebagian besar kepala daerah berumur antara 40 sampai dengan 55 tahun atau usia menengah. Variabel masa jabatan memiliki nilai minimum 1 bl dan nilai maksimum 120 bulan, sedangkan nilai *mean* 58,1773 bulan dan standar deviasi 33, 33221. Hal ini berarti rata-rata kepala daerah menjabat baru satu periode (*non incumbent*). Variabel tingkat pendidikan nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4, sedangkan nilai *mean* 2, 5957 dan standar deviasinya 0, 82210. Hal ini berarti bahwa rata-rata tingkat pendidikan kepala daerah strata dua (S2). Variabel ukuran DPRD nilai minimum 20 orang dan nilai maksimum 45 orang, sedangkan nilai *mean* 29,2411 orang dan standar deviasi 6,30246.

4.2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Beda

Uji beda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama yaitu untuk mengetahui alokasi anggaran belanja pendidikan kepala daerah *incumbent* pada masa jabatan kedua lebih besar dari non *incumbent*. Hasil analisis uji beda dengan *Independent Sample T-Test* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Output *Independent Sample T-Test*

Variabel	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means	
	F	Sig.	t	Sig. (2-tailed)
Alokasi anggaran belanja pendidikan	0,702	0,403	1,103	0,271
	Equal variances assumed			
	Equal variances not assumed		1,097	0,274

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017.

Pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sig. F hitung dengan *Equal variance assumed* adalah 0,403 dimana lebih besar dari 0,05 maka kedua varian populasi identik maka t-test menggunakan *Equal variance assumed*. Nilai t-test *Equal variance assumed* sebesar 1,103 dengan Sig. (2-tailed) adalah 0,271 atau lebih besar dari 0,05 sehingga diputuskan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata antara kepala daerah *incumbent* pada masa jabatan kedua dengan non *incumbent*. Dengan demikian hipotesis pertama ditolak yang berarti bahwa rerata alokasi anggaran belanja pendidikan kepala daerah *incumbent* pada masa jabatan kedua tidak lebih besar dari non *incumbent* yang dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. Pada Tabel 4 diketahui bahwa rerata alokasi anggaran belanja pendidikan kepala daerah *incumbent*

pada masa jabatan kedua sebesar 30,5648% lebih kecil dari rerata kepala daerah non *incumbent* yaitu 31,4677%. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran belanja pendidikan oleh kepala daerah *incumbent* pada masa jabatan kedua di Pulau Sulawesi.

Tabel 4

Perbedaan Rerata pada *Independent Sample T-Test*

Variabel	Status Kepala Daerah	N	Mean
Alokasi anggaran belanja pendidikan	Non <i>Incumbent</i>	172	31,4677
	<i>Incumbent</i>	110	30,5648

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017.

b. Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda dilakukan dengan menggunakan metode *enter*. Nilai *Adjusted R²* adalah 0,272 yang berarti 27,2% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen (Umur, Masa Jabatan, Tingkat Pendidikan dan Ukuran DPRD) dan sisanya sebanyak 72,8% dijelaskan oleh faktor lain. Nilai F hitung sebesar 27,272 (*p-value* = 0,000), signifikan pada tingkat 5%, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi alokasi anggaran belanja pendidikan atau dapat dikatakan bahwa umur, masa jabatan, tingkat pendidikan dan ukuran DPRD secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja pendidikan. Hasil regresi berganda disajikan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4

Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Hip	T	Sig	Hasil	
(Constant)		11,530	4,794	0,000	
Umur	+	0,946	1,401	0,162	Tidak berpengaruh
Masa Jabatan	+	-0,026	-2,326	0,021*	H2b ditolak
Tingkat Pendidikan	+	1,967	4,687	0,000*	H2c didukung
Ukuran DPRD	+	0,469	8,502	0,000*	H3 didukung
R ²			0,532		
<i>Adjusted R²</i>			0,272		
<i>F-value</i>			27,272		
<i>Asymp Sig</i>			0,000		

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017.

*Secara statistik signifikan pada tingkat 5%

Hasil regresi berganda (Tabel 4) menunjukkan bahwa terdapat satu prediktor tidak signifikan yang mempengaruhi alokasi anggaran belanja pendidikan, yaitu umur kepala daerah (*p-value* sebesar 0,162). Sementara masa jabatan kepala daerah, tingkat pendidikan kepala daerah dan ukuran DPRD berpengaruh pada alokasi anggaran belanja pendidikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prayitno (2012) dimana umur tidak berpengaruh

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dimungkinkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penganggaran dan penyerapan belanja pendidikan tidak ditentukan oleh umur kepala daerah tetapi lebih pada komitmen dari kepala daerah. Oleh karena itu, umur kepala daerah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja pendidikan.

Masa jabatan kepala daerah (*p-value* sebesar 0,021) merupakan prediktor signifikan dengan *t* hitung -2,326. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Prayitno (2012) dimana masa jabatan kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dimungkinkan semakin lama kepala daerah menjabat maka akan semakin meminimalkan risiko yang berdampak pada dirinya karena dengan jabatan yang lebih lama memungkinkan untuk selalu belajar dan memperbaiki setiap kesalahan, sehingga akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan etis untuk mengevaluasi alokasi anggaran belanja pendidikan pada tahun selanjutnya agar lebih efektif karena dimungkinkan dalam penganggaran berbasis kinerja, penganggaran untuk belanja tertentu bisa lebih kecil dari tahun sekarang tergantung dari prioritasnya (Mahmudi 2016: 160).

Tingkat pendidikan kepala daerah (*p-value* sebesar 0,000) merupakan prediktor signifikan dengan *t* hitung 4,687. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Prasetyo (2014) dimana tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa kepala daerah dengan pendidikan yang tinggi akan cenderung bisa memahami peraturan perundang-undangan sehingga akan selalu berusaha meningkatkan kinerja keuangan dengan menghindari risiko pengurangan alokasi anggaran belanja pendidikan dalam rasionalisasi anggaran belanja pendidikan yang akan dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Bamber *et al.* (2010) dimana tingkat pendidikan manajer dikaitkan dengan keterbukaan dalam berpikir dan kemampuan dalam memproses informasi yang berdampak pada *outcome* organisasi.

Ukuran DPRD (*p-value* sebesar 0,000) merupakan prediktor signifikan dengan *t* hitung 8,502. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Giligan dan Matsusaka (2001) bahwa anggota legislatif dengan jumlah yang lebih banyak cenderung meningkatkan belanja pemerintah dalam bidang pendidikan dan infrastruktur. Jumlah anggota DPRD yang semakin banyak akan memberikan kontrol yang lebih besar terhadap pengelolaan anggaran oleh kepala daerah sehingga akan mempengaruhi kepala daerah untuk selalu meningkatkan kinerja keuangan dengan menghindari risiko pengurangan alokasi anggaran belanja pendidikan dalam

rasionalisasi anggaran belanja pendidikan yang akan dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran belanja pendidikan oleh kepala daerah *incumbent* pada masa jabatan kedua di Pulau Sulawesi yang ditunjukkan dengan nilai rerata alokasi anggaran belanja pendidikan kepala daerah *incumbent* (30,5648%) pada masa jabatan kedua tidak lebih besar dari non *incumbent* (31,4677%).
- b. Alokasi anggaran belanja pendidikan dipengaruhi oleh karakteristik kepala daerah yang meliputi masa jabatan dan tingkat pendidikan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama kepala daerah menjabat dan semakin tinggi tingkat pendidikan kepala daerah maka kepala daerah akan selalu belajar dan mengevaluasi kinerja keuangannya serta akan lebih terbuka dalam berpikir untuk memproses informasi yang berdampak pada *outcome* organisasi (Bamber *et al.* 2010). Sementara itu, karakteristik kepala daerah yang diprosikan dengan umur kepala daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja pendidikan.
- c. Alokasi anggaran belanja pendidikan dipengaruhi oleh ukuran DPRD. Jumlah anggota DPRD yang semakin banyak akan memberikan kontrol yang lebih besar terhadap pengelolaan anggaran oleh kepala daerah sehingga akan mempengaruhi kepala daerah untuk selalu meningkatkan kinerja keuangan dengan menghindari risiko pengurangan alokasi anggaran belanja pendidikan dalam rasionalisasi anggaran belanja pendidikan yang akan dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya.

5.2. Implikasi

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting terkait dengan pengalokasian anggaran belanja pendidikan sebagai berikut:

- a. Kepala daerah baik yang baru menjabat satu periode maupun yang sudah menjabat pada periode kedua diharapkan untuk dapat mengelola anggaran dalam APBD lebih baik khususnya dalam pengalokasian anggaran belanja pendidikan agar lebih efektif dalam penganggaran dan pelaksanaannya.
- b. Anggota DPRD diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pengelolaan APBD khususnya dalam pengalokasian anggaran belanja pendidikan sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat terealisasi sesuai dengan yang telah direncanakan.

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini menguji karakteristik kepala daerah dan ukuran DPRD hanya pada kabupaten/kota di pulau Sulawesi. Keterbatasan ini mungkin mengakibatkan model penelitian hanya mampu menjelaskan variabel dependen yaitu alokasi anggaran belanja pendidikan sebesar 27,2%, sementara sisanya sebesar 72,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini, sehingga masih memungkinkan untuk penelitian selanjutnya menambahkan atau memodifikasi penelitian dengan faktor-faktor yang lain dan memperluas wilayah penelitiannya.
- b. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pemerintah daerah dan profil kepala daerah yang terbatas tahunnya yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2015, sehingga pemerintah daerah yang memenuhi kriteria sampel terbatas 47 kabupaten/kota, masih ada periode yang belum diteliti tahun 2016 dan sebelum tahun 2010 yang memungkinkan penelitian selanjutnya menambahkan periode penelitiannya lebih panjang.

5.4. Saran

Setelah memperhatikan keterbatasan penelitian di atas, dapat diberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

- a. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian dengan memasukkan variabel selain karakteristik kepala daerah dan karakteristik pemerintah daerah yang mungkin mempengaruhi alokasi anggaran belanja pendidikan.
- b. Periode penelitian selanjutnya dapat diperpanjang sehingga didapatkan jumlah sampel yang lebih banyak yang bisa memberikan gambaran yang lebih konsisten.

Daftar Pustaka

- Amaefula, C., Okezie, C. A., dan Mejeha, R. 2012. Risk Attitude and Insurance : A Causal Analysis. *American Journal of Economics* 2 (3): 26-32.
- Arifin, A., dan A. Yuliarni. 2014. Analisis Tingkat Penyerapan Belanja Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo. Seminar Nasional dan Call for Paper Program Studi Akuntansi FEB-UMS. 25 Juni 2014. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/> diakses tanggal 14 Nopember 2016.
- Ariffin, A.N.B., McGowan, C.B. Jr., Tunde, M.B., dan Shahnaz, A.S. 2014. Top Management Characteristics and Firm's International Diversification Activities: Evidence from a Developing Nation. *Pertanika Journal Social Sciences & Humanities* 22 (S): 39 – 54.
- Asih, D. A. T. 2006. Pengaruh Pengalaman Terhadap Peningkatan Keahlian Auditor dalam Bidang Auditing. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. *E-journal.uajy.ac.id./969/6/5EA16341.pdf*. Diakses tanggal 29 Oktober 2016.
- Bamber, L., J. Jian dan I. Wang. 2010. What's My Style? The Influence of Top Managers and Their Personal Backgrounds on Voluntary Corporate Financial Disclosure. *The Accounting Review* 85 (4): 1131 – 1162.
- Bradbury, J.C., dan E. F. Stephenson. 2003. Local Government Structure and Public Expenditures. *Public Choice* 115: 185–198.
- Chauffman, E., Shulman, E. P., Steinberg, L., Claus, E., Banich, M. T., Graham, S., dan Woolard, J. 2010. Age Differences in Affective Decision Making as Indexed by Performance on The Iowa Gambling Task. *Developmental Psychology* 46 (1): 193-207.

- Drazen, A. dan Eslava, M., 2010. Electoral Manipulation Via Voter-Friendly Spending: Theory and Evidence. *Journal of Development Economics* 92: 39-52.
- Ellis, T. dan J. Child. 1973. Placing Stereotypes of The Manager into Perspective. *Journal of Management Studies* 10 (3): 233-255.
- Ferraz, C., and F. Finan. 2007. Electoral Accountability and Corruption in Local Governments: Evidence from Audit Reports. *IZA Discussion Papers*, No. 2843.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giligan, T. W. dan J. G. Matsusaka. 2001. Fiscal Policy, Legislature Size, and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century. *National Tax Journal* 54: 57-82.
- Hambrick, D., dan P. Mason. 1984. Upper Echelons: The Organization as A Reflection of Its Managers. *Academy of Management Review* 9 (2): 193-106.
- Hindrayani, A dan S.A. Totalia. 2010. *Teknik Pengolahan Data*. UNS Press. Surakarta.
- Hitt, M., dan B. Tyler. 1991. Strategic Decision Models: Integrating Different Perspectives. *Strategic Managemet Journal* 12 (5): 327 – 351.
- Kahneman, D dan A Tversky. 1979. Prospect Theory an Analysis of Decisions Under Risk, *Econometrica* 47: 263 – 291.
- MacDonald, L., 2008. The impact of government structure on local public expenditures. *Public Choice* 136: 457–473.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, A., 2014. Karakteristik Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Tesis Magister Akuntansi tidak dipublikasikan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Prasojo, E., 2009. Reformasi kedua-Melanjutkan Estafet Reformasi. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Prayitno, S., 2012. Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Tesis Magister Akuntansi tidak dipublikasikan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Qanun Aceh No 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
- Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Rahmawati, I., 2015. Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Incumbent dan Latar Belakang Partai Politik (Political Background) Terhadap Indikasi Terjadinya Korupsi Belanja Bantuan Sosial di Indonesia (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Indonesia). *Tesis Magister Akuntansi tidak dipublikasikan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Ritonga, I.T. dan Alam, M.I. 2010. Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). *Makalah Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII*, Purwokerto.
- Sekaran dan Bougie. 2013. *Research Method For Business, A Skill-Building Approach*, Sixth Edition. New York: John Willey & Son Inc.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. cetakan ketiga. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sutaryo dan J. Winarna. 2013. Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Manado.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen tentang *Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Winarna, J., dan S. Murni. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*, 26 – 28 Juli 2007.
- World Bank, 2008. *Investasi dalam Pendidikan pada Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia*. Kantor Bank Dunia; Jakarta.
- Yuliarni, A. 2012. Analisis Tingkat Penyerapan Belanja Pendidikan di Kabupaten Boyolali. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id>. diakses tanggal 11 Oktober 2016.

Apendiks

Lampiran 1: Data Sampel Penelitian

No	Daerah	No	Daerah
1	Kab. Bolaang Mongondow	25	Kab. Parigi Moutong
2	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	26	Kab. Poso
3	Kab. Kepulauan Sangihe	27	Kab. Tojo Una-una
4	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	28	Kota Palu
5	Kab. Kepulauan Talaud	29	Kab. Kolaka
6	Kab. Minahasa Selatan	30	Kab. Kolaka Utara
7	Kota Bitung	31	Kab. Konawe Selatan
8	Kota Kotamubagu	32	Kab. Muna
9	Kota Manado	33	Kota Bau-Bau
10	Kab. Barru	34	Kota Kendari
11	Kab. Gowa	35	Kab. Boalemo
12	Kab. Kepulauan Selayar	36	Kab. Bone Bolango
13	Kab. Luwu	37	Kab. Gorontalo
14	Kab. Luwu Utara	38	Kab. Pohuwato
15	Kab. Maros	39	Kota Gorontalo
16	Kab. Pangkajene	40	Kota Tomohon
17	Kab. Pinrang	41	Kab. Bulukumba
18	Kab. Tana Toraja	42	Kab. Luwu Timur
19	Kab. Toraja Utara	43	Kab. Bantaeng
20	Kab. Wajo	44	Kab. Polewali Mandar
21	Kota Palopo	45	Kab. Minahasa Tenggara
22	Kota Parepare	46	Kab. Bolaang Mongondow Timur
23	Kab. Buol	47	Kab. Takalar
24	Kab. Morowali		

Lampiran 2: Hasil Uji Statistik

1. Uji Independen Sample t-test

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Alokasi Anggaran	Equal variances assumed	.702	.403	1.103	280	.271	.90286	.81861	-.70855	2.51426
	Equal variances not assumed			1.097	227.915	.274	.90286	.82337	-.71954	2.52525

Group Statistics

Status Kepala Daerah	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Alokasi Anggaran Non Incumbent	172	31.4677	6.63577	.50597
Incumbent	110	30.5648	6.81270	.64956

2. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Alokasi Anggaran	282	16.04	48.87	31.1155	6.70778
Umur	282	1.00	3.00	2.4255	.54979
Masa Jabatan	282	1.00	120.00	58.1773	33.33221
Tingkat Pendidikan	282	1.00	4.00	2.5957	.82210
Ukuran DPRD	282	20.00	45.00	29.2411	6.30246
Valid N (listwise)	282				

3. Uji Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Ukuran DPRD, Umur, Tingkat Pendidikan, Masa Jabatan ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Alokasi Anggaran

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.532 ^a	.283	.272	5.72255	.854

a. Predictors: (Constant), Ukuran DPRD, Umur, Tingkat Pendidikan, Masa Jabatan

b. Dependent Variable: Alokasi Anggaran

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3572.316	4	893.079	27.272	.000 ^a
	Residual	9071.092	277	32.748		
	Total	12643.408	281			

a. Predictors: (Constant), Ukuran DPRD, Umur, Tingkat Pendidikan, Masa Jabatan

b. Dependent Variable: Alokasi Anggaran

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.530	2.405		4.794	.000		
	Umur	.946	.675	.078	1.401	.162	.846	1.183
	Masa Jabatan	-.026	.011	-.129	-2.326	.021	.836	1.196
	Tingkat Pendidikan	1.967	.420	.241	4.687	.000	.979	1.021
	Ukuran DPRD	.469	.055	.440	8.502	.000	.966	1.035

a. Dependent Variable: Alokasi Anggaran